

Kekacauan Pemilu 2019: Fenomena *Firehose of Falsehood* dalam Relasi Sikap terhadap HOAX dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Komisi Pemilihan Umum

Lusy Asa Akhrani,¹ Ika Herani,² Ibnu Asqori Pohan,³ Muhammad Afif Alhad⁴

^{1,2,4} Jurusan Psikologi, FISIP Universitas Brawijaya

³ Ilmu Politik, FISIP Universitas Brawijaya

Abstract. Firehose of falsehood is a propaganda technique that has used in the political world. This propaganda is used by presenting hoax news/hoaxes in public awareness continuously until the public believes the news. The community more easily and quickly accepts media news anywhere and anytime because the public has direct media access to grasp. In contrast, the literacy and rechecking of news content are often not done due to time constraints and the emotional content of newsreaders. Information media believed to be one of the sources of increasing distrust in the election organizers, namely the KPU, this has been sharpened by various incidents and phenomena throughout the election which were noisy and caused a commotion in the community. This study aims to explore people's attitudes towards HOAX news on trust in the KPU. The research method uses quantitative with a survey approach to 558 voter respondents through the distribution of Trust research scale to KPU and attitude scale towards hoaxes. Data analysis of this research using multiple linear regression. The results study indicate there is a role for attitudes towards hoaxes towards trust in the KPU in Indonesia.

Keywords: Firehose of falsehood; Attitude toward hoax; KPU Trust

Abstrak. *Firehose of falsehood* adalah teknik propaganda yang telah digunakan dalam dunia politik. Propaganda ini digunakan dengan menghadirkan berita bohong / hoax dalam kepedulian publik secara terus menerus sampai publik mempercayai berita tersebut. Masyarakat lebih mudah dan cepat menerima berita media di mana saja dan kapan saja karena publik memiliki akses media langsung untuk dipahami. Sebaliknya, literasi dan pengecekan ulang konten berita seringkali tidak dilakukan karena keterbatasan waktu dan konten emosional pembaca berita. Media informasi diyakini menjadi salah satu sumber meningkatnya ketidakpercayaan pada penyelenggara pemilu, yaitu KPU, hal ini dipertajam dengan berbagai kejadian dan fenomena sepanjang pelaksanaan pemilu yang tampak gaduh dan menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sikap masyarakat terhadap berita HOAX terhadap kepercayaan pada KPU. Metode penelitian menggunakan kuantitatif korelasional dengan pendekatan survei kepada 558 responden pemilih melalui distribusi skala penelitian *Trust* ke KPU dan skala sikap terhadap hoax. Analisis data penelitian dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil studi menunjukkan ada peran sikap terhadap berita hoax terhadap kepercayaan masyarakat pada KPU di Indonesia.

Kata kunci: *Firehose of falsehood*; Kepercayaan terhadap KPU; Sikap pada berita Hoax

Received: 22/01/2020

Revised: 14/02/2020

Accepted: 25/02/2020

Korespondensi:

Jurusan Psikologi, FISIP, Universitas Brawijaya
Jalan Veteran, Malang 65145
Email: lusyasa@ub.ac.id

P PENDAHULUAN

Pemilu 2019 telah selesai dihelat namun menyisakan banyak permasalahan saat pencoblosan pada 17 April lalu. Serta banyak potensi kecurangan yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam waktu bersamaan Bawaslu menyampaikan ada 5.400 lebih KPPS melakukan mengarahkan pemilih calon tertentu, kesalahan penghitungan suara, basis data sampling yang belum menyelenggarakan pencoblosan, banyaknya TPS tambahan, jumlah pemilih membengkak, dan basis data pemilih yang tidak akurat menunjukkan ketidaksiapan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu serentak (Wahid dalam Mashabi, 2019). Masyarakat sendiri terbelah menjadi dua, terjadi perang opini antar pendukung di hampir semua media sosial. Masyarakat bergerak mencari data dan bukti kecurangan pemilu, membagikan pada saluran media sosial yang dimiliki. Media mainstarim sendiri menyajikan data cenderung memihak salah satu pasangan, membuat masyarakat bergerak mencari data sendiri serta menyiarkan berita sendiri. Gelombang besar pemberitaan media dan media sosial ini memperkuat keyakinan terjadinya kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.

KPU sendiri bergeming menghadapi gelombang protes. Penghitungan tetap berjalan meskipun tak pernah reda bukti-bukti baru ditunjukkan masyarakat. Penetapan kesalahan KPU oleh Bawaslu pun tak memiliki sanksi yang menyertai sehingga penghitungan tetap berjalan dan tidak dilakukan perbaikan. Fenomena ini membawa kondisi politik yang rentan pada konflik baik horizontal maupun vertikal. Eskalasi konflik meningkat dengan tajam. Pada paparan konflik horizontal, masyarakat berkonflik antar pendukung pasangan calon, perang opini, adu data, sampai dengan saling lapor. Masyarakat memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan kecurangan dan juga menyerang pihak berlawanan melalui adu argumen bahkan sampai dengan saling lapor dengan dalil UU ITE. Dalam wilayah konflik vertikal ditunjukkan dengan kondlik penguasa dan rakyat. Pemerintah dalam kasus kecurangan pemilu belum memberikan pernyataan secara jelas dan resmi, tidak menginstruksikan apa pun pada rakyat maupun penyelenggara pemilu demi meredam eskalasi konflik. Aparat pemerintah justru menjerat pihak-pihak

berlawanan dengan jeratan UU ITE, delik Makar dan kasus lainnya untuk meredam gejolak arus bawah. Namun tampaknya upaya represif ini semakin mempercepat potensi ledakan konflik. Rasa kepercayaan yang jauh menurun pada penyelenggara pemilu ini (KPU) menyebabkan delegitimasi KPU. Upaya mendelegitimasi atau minimal menjelek-jelekkkan KPU sebetulnya pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Bahkan PDIP yang kini membela lembaga itu pernah melakukannya. PDIP pernah menyerang KPU pada tahun 2009. Waktu itu fraksi PDIP di DPR sepakat menindaklanjuti rekomendasi panitia Hak Angket Daftar Pemilih Tetap Periode 2004-2009. PDIP sepakat untuk mengikuti rekomendasi panitia: memberhentikan ketua dan anggota KPU karena dianggap tak becus menyelesaikan persoalan daftar pemilih tetap.

Posisi KPU memang selalu terhimpit oleh dua kelompok yang sedang berkompetisi. Apa pun kebijakan yang dikeluarkan KPU, pasti akan ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan dan dirugikan. Dan kubu oposisi biasanya memang merasa jadi pihak yang dirugikan. Sama halnya dengan isu terkait model debat capres-cawapres yang dirumuskan KPU saat ini dianggap menguntungkan petahana, maka oposisi akan mengkritiknya. Meski demikian, kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan KPU itu dianggap wajar selama tak mengganggu kinerja. Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay punya pendapat lain terkait kondisi KPU saat ini. Bagi dia, saat ini titik lemah KPU adalah soal komunikasi dan profesionalitas. Ini yang membuat mereka rentan dikritik. Meski KPU nantinya mengklaim bekerja dengan baik, namun akan tetap ada ketidakpercayaan dari proses dan hasil pemilu itu. Delegitimasi KPU semakin nyata saat protes masyarakat tidak diresponse dengan cepat dan tepat, sehingga masyarakat dihadapkan dengan pemberitaan media yang beragam dan tidak akurat. Pemberitaan media yang seringkali dijadikan senjata politik adalah teknik propaganda *Firehose of falsehood*. *Firehose of falsehood* adalah strategi pembuat propaganda untuk membanjiri publik dengan memproduksi serangkaian informasi yang salah dan kepalsuan tiada henti dan dilakukan pada masa kampanye. Tujuannya, menggiring publik untuk memilih dan memenangkan calon yang didukungnya. Hal terpenting bukan kebenaran informasi, tapi bagaimana berita itu diproduksi secara massal dan membakar emosi massa dengan berbagai cara,

sesering mungkin dan sebanyak mungkin. Sehingga, informasi yang tidak benar pun pada akhirnya diterima oleh publik sebagai suatu kebenaran.

Teknologi komunikasi dan informasi (TIK) berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan adanya beragam media termasuk media online. Kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan media online dalam penggunaannya menjadikan media ini menjadi wadah penyebaran informasi yang sangat berpengaruh pada masyarakat. Media online tidak hanya mengubah cara penyampaian informasi tetapi juga mengubah cara masyarakat mengkonsumsi informasi tersebut (Juditha, 2018). Informasi atau berita yang dianggap benar tidak lagi mudah ditemukan. Survey Mastel (2017) mengungkapkan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita hoax setiap hari dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari. Bahkan media arus utama yang diandalkan sebagai media yang dapat dipercaya terkadang ikut terkontaminasi penyebaran hoax. Media arus utama juga menjadi saluran penyebaran informasi/berita hoax, masing-masing sebesar 1,20% (radio), 5% (media cetak) dan 8,70% (televisi). Hoax sangat banyak beredar di masyarakat melalui media online. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mastel (2017) menyebutkan bahwa saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran hoax adalah situs web, sebesar 34,90%, aplikasi chatting (Whatsapp, Line, Telegram) sebesar 62,80%, dan melalui media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dan Path) yang merupakan media terbanyak digunakan yaitu mencapai 92,40%. Sementara itu, data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar hoax dan ujaran kebencian (Pratama, 2016).

Saat ini penyebaran informasi/berita bohong (hoax) makin marak. Survei Mastel 2017 mengungkapkan bahwa masyarakat menerima hoax setiap hari lebih dari satu kali. Saluran yang paling banyak digunakan dalam penyebaran hoax adalah media sosial. Fenomena hoax di Indonesia menimbulkan keraguan terhadap informasi yang diterima dan membingungkan masyarakat. Hal ini dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menanamkan fitnah dan kebencian. Keberadaan internet berdampingan dengan kebudayaan yang terbangun di dalam ruang publik baru membuat masyarakat sulit membedakan informasi faktual dan hoax. Banyak ahli

yang telah mencoba meneliti tentang hoax, reproduksi dan persebarannya dengan tujuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana hoax bekerja. Paparan pemberitaan hoax dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam hal ini perilaku politik. Propaganda *Firehose of falsehood* tak dapat berhasil tanpa bantuan dari media, media sosial terutama membantu penyebaran berita hoax yang mampu mengaduk emosi pembaca berita (mastel, 2017).

Firehose of falsehood merupakan propaganda politik yang memanfaatkan ilmu komunikasi berdasarkan neuroscience dan big data untuk menciptakan ketakutan melalui pemberitaan kebohongan oleh media-media dan diproduksi secara masif. Strategi kampanye/ politik melalui pemberitaan-pemberitaan kebohongan yang sangat masif, dari berbagai sumber, sehingga menggiring masyarakat pada issue kebohongan yang dihembuskan seolah issue tersebut benar dan penting. Serangan pemberitaan menimbulkan kebingungan dan menghasilkan ketakutan dalam masyarakat. Serangan pemberitaan hoax akan efektif memengaruhi bagian otak (*amygdala*) – bagian otak yang bertanggung jawab untuk mendeteksi rasa takut dan mempersiapkan diri pada kondisi darurat. *Obvious lies* atau kebohongan tersurat dan terencana untuk menghasilkan ketakutan. Secara psikologis bertujuan mengaktifkan dan mengisi "reptilian brain" individu secara massal dengan "fear". *The Reptilian Brain* berkembang lebih dari jutaan tahun untuk melindungi individu. Bagian ini mengatur tubuh dan kebiasaan, dan akan mengambil keputusan cepat untuk *Fight* atau *Flight* dalam keadaan terdesak. Dalam konteks politik dibutuhkan sikap yang tegas dari masyarakat saat menerima berita politik dari media manapun.

Sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya Secord dan Backman (Azwar, 2012). Sedangkan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesipan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan La Pierre (Azwar, 2012). Fishbein dan Ajzen (Faturochman, 2006) sikap diartikan sebagai organisasi yang relatif menetap dari perasaan-parasaan, keyakinan keyakinan dan kecenderungan perilaku terhadap orang lain, kelompok, ide atau objek tertentu. Tokoh lain yang mendefinisikan sikap

yaitu Thurstone dalam Dayakisni dan Hudaniah (2006) bahwa sikap merupakan suatu tingkatan afek, baik itu bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis. Kimball Young (Dayakisni dan Hudaniah, 2006) mendefinisikan sikap sebagai suatu predisposisi mental untuk melakukan suatu tindakan. Aspek sikap sendiri terdiri dari tiga yaitu aspek kognitif yang meliputi hal-hal yang diinginkan, pengetahuan yang dimiliki individu, pendapat, pemikiran tentang hal-hal yang diinginkan oleh individu, aspek afektif meliputi emosi yang dimiliki oleh individu terhadap keinginannya dan aspek konatif menjelaskan tentang variabel yang mempengaruhi dan mengarahkan perilaku individu, sehingga individu dapat mengarahkan tingkah laku yang ingin ditampilkan.

Sikap terhadap berita hoax belum memiliki teori baku, dalam penelitian panjang dikonstruksikan teori dan alat ukur terkait sikap pada berita hoax. Hoax diartikan sebagai bentuk penipuan yang ditujukan untuk membuat suatu kelucuan bahkan membuat hal yang membahayakan (Oxford, 2017). Menurut Silverman dalam Judhita (2015) hoax merupakan rangkaian informasi yang menyesatkan tetapi dibuat sebagai suatu kebenaran dan dapat mempengaruhi seseorang. Melalui hasil survey yang dilakukan, sikap pada berita hoax dianalisis dan dirumuskan menjadi tiga dimensi untuk skala sikap hoax yaitu *rational* dimana seseorang memproses informasi dengan berbagai macam pertimbangan sehingga didapatkan kesimpulan yang masuk akal, *avoidant* yang merupakan kecenderungan seseorang menghindari membaca informasi yang belum jelas kebenarannya. Sikap dimana seseorang akan meninjau kembali informasi yang didapatkan dan akan dibandingkan dengan informasi yang lain sehingga dapat mengetahui kebenarannya dan *dependent* yaitu kecenderungan seseorang meminta pendapat orang lain tentang informasi yang diperoleh.

Lalu lintas pemberitaan ini sedikit banyak mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga satu-satunya yang berwenang terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Ditambah lagi pemberitaan terkini terkait korupsi di KPU yang melibatkan KPU, Bawaslu dan salah satu partai besar yang sedikit banyak akan mempengaruhi perilaku politik masyarakat di musim pemilu 2024 mendatang (Koran Tempo, 2020). Kepercayaan terhadap KPU menjadi sangat dibutuhkan melihat meningkatnya rasa tidak percaya masyarakat terhadap KPU. Kepercayaan politik

merupakan kepercayaan seseorang terhadap komponen-komponen politik yang berlaku saat ini (Miztal, 2001). Kepercayaan politik merupakan harapan masyarakat (public expectation) terhadap seorang pemimpin untuk merespon, mengagregasikan serta mengartikulasikan tuntutan dan aspirasi masyarakat (Samaloisa, 2009). Kepercayaan politik merupakan bentuk kepercayaan pada komponen-komponen sistem politik yang berlaku (Matulesy, 2013). Masyarakat akan melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek politik dalam menentukan tingkat kepercayaan mereka pada politik. Menurut Miller & Listhaug (Freire, Magalhaes, & Santo, 2003) kepercayaan politik muncul setelah individu membuat evaluasi positif terhadap pemerintah, sekaligus yakin pada lembaga politik lainnya. *Political trust* memiliki hubungan yang melekat dengan hasil kerja dari lembaga politik, sehingga sulit untuk membedakan dengan evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah (Catterberg dan Moreno, 2005). Magum (Ramadhani, 2008) menyebutkan bahwa kepercayaan politik merupakan faktor yang mempengaruhi keterlibatan individu dalam politik. Yudong (2008) menyebutkan bahwa kepercayaan politik dibutuhkan untuk stabilitas politik sebuah rezim. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan politik dipengaruhi beberapa hal seperti budaya, kinerja pemerintahan, media, hubungan interpersonal dan tingkat pendidikan (Crete, Pelletier, Couture, 2007). Listhaug dan Orren dalam penelitiannya (Crete dkk, 2007) menyebutkan bahwa kepercayaan dapat bergerak naik dan turun. Menurut mereka dua faktor yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut yaitu faktor jangka panjang dan jangka pendek. Faktor jangka panjang meliputi nilai-nilai baru yang dihasilkan melalui interaksi jangka panjang, yang menghasilkan daya kritis masyarakat pada politik seperti pada pemerintah sebagai pemilik otoritas. Selain perubahan nilai, faktor jangka panjang dapat pula berupa ekspektasi masyarakat pada kinerja pemerintahan. Sedangkan faktor jangka pendek meliputi kondisi ekonomi yang direkam masyarakat saat itu, evaluasi atas kejujuran dan integritas pemimpin politik.

Kepercayaan politik dapat pula dilihat dari struktur masyarakat. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh pada kepercayaan politik. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula kepercayaan politik. Tetapi hasil penelitian ini dibantah oleh fenomena dari perilaku

memilih. Rata-rata non voting justru dilakukan oleh individu dengan tingkat pendidikan dan pemahaman politik yang baik. Inglehart (Crete dkk, 2007) membagi masyarakat dalam tiga tingkatan yaitu masyarakat materialistis, masyarakat pasca materialistis, dan masyarakat gabungan atau campuran. Penjelasan struktur masyarakat Inglehart ini mirip dengan penjelasan teori kebutuhan Maslow. Tingkatan pertama adalah masyarakat materialistis yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti ekonomi dan keamanan. Masyarakat pada tingkat ini bergerak dan menilai berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat berikutnya adalah masyarakat pasca materialistis, yang bercirikan individu-individu yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dan lebih berfokus pada kualitas hidup, kebebasan individu, mencari dan mengeksplor ruang untuk diri, ekspresi diri, gaya hidup. Inglehart menekankan bahwa perubahan ekonomi dan sosial dapat mengubah nilai-nilai warga dan mempengaruhi kepercayaan politik. Perubahan nilai dapat mempengaruhi harapan masyarakat terhadap proses demokrasi. Struktur masyarakat post materialistis ini cenderung kritis pada penguasa sipil dan otoritas pemerintahan, sehingga lebih memiliki kepercayaan politik yang rendah. Kepercayaan dalam bidang politik menurut Boukaert dan Van De Walle (ESDIInds) merujuk pada tiga hal yaitu pemerintahan yang baik, kualitas hidup dan etika kelembagaan.

Lewicki & Tomlinson memusatkan penelitiannya pada topik kepercayaan. Menurut Lewicki & Tomlinson fenomena kepercayaan diteliti dalam banyak bidang seperti ekonomi, psikologi sosial dan politik. Kepercayaan menurut Lewicki & Tomlinson (2003) kepercayaan merupakan keyakinan dan kesediaan untuk bertindak dan menentukan keputusan demi kepentingan dirinya dan orang lain terhadap obyek kepercayaan. Obyek kepercayaan politik menghasilkan kepercayaan politik sebagai evaluasi terhadap (1) ability pihak-pihak dalam politik (pemerintah dan dewan), (2) integrity yaitu penilaian terhadap politikus dilihat dari konsistensi perilaku dimasa lalu, kredibilitas dalam berkomunikasi, kesediaannya untuk sejalan dengan pihak lain, dan terakhir adalah (3) benevolence yang merupakan analisa bahwa pihak yang dijadikan obyek kepercayaan memang layak diberikan kepercayaan, hal ini dapat dinilai dari perilaku yang ditujukan pihak lain. Hetherington & Husser, (Bauer, 2013) mengatakan bahwa kepercayaan politik merupakan sebagai orientasi evaluatif

masyarakat terhadap sistem politik atau bagian dari partai politik dan membandingkannya dengan kinerja atau hasil kerja pemerintah. Kepercayaan politik tidak hanya berhenti pada rasa percaya terhadap pemerintah, namun juga puas terhadap elemen-elemen yang melekat. Hasil penelitian Jennings & Stoker tahun 2004 (Tao, Yang, Li & Lu, 2014) menjelaskan bahwa kepercayaan politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik. Gamson (Hasbi, Tantio, Azhari, Khairani, Fatimah, Ivan, & Mirra, 2013) menjelaskan bahwa di dalam kepercayaan politik terdapat suatu keyakinan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan individu atau publik. Individu yang memiliki kepercayaan politik akan cenderung memiliki tingkat partisipasi politik (Bourne, 2010). Indikasinya ditunjukkan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik berdampak turunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada institusi/ lembaga politik mampu meningkatkan partisipasi politik individu. Hal ini sama seperti penelitian Hetherington, 2006; Norris, 99, 2011; Phar & Putnam, 2000; Putnam, 2000 (Tao, Yang, Li & Lu, 2014), Hasbi dkk (2013).

Kepercayaan politik dalam penelitian ini mempertimbangkan berbagai penelitian dan tokoh, dan dalam pembentukan skala peneliti menggunakan milik Lewicki dimana kepercayaan politik merupakan kepercayaan dengan obyek politik yaitu merupakan bentuk kepercayaan pada komponen-komponen sistem politik yang berlaku yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek politik dalam menentukan tingkat kepercayaan mereka pada politik. Variabel kepercayaan politik ini menggunakan teori dari Lewicki dimana menjelaskan komponen kepercayaan terdiri dari tiga yaitu ability, integrity dan benevolence.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Menurut Azwar (2012) pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang mengacu pada data berupa angka dan diolah menggunakan metode statistik dalam proses analisis. Metode korelasional adalah penelitian yang bertujuan melihat keterkaitan antar variabel berdasarkan koefisien korelasi. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui peran propaganda *firehose of falsehood* dalam sikap hoax terhadap kepercayaan pada KPU.

Partisipan Penelitian

Menurut Azwar (2012) populasi merupakan kelompok subjek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Populasi dalam penelitian adalah seluruh Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2024. Sedangkan sampel merupakan bagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2013). Cara untuk menentukan jumlah sampel dari populasi yang tidak diketahui jumlahnya dapat dibantu dengan menggunakan software G*Power 3.1.9.2. Menggunakan statistical test dengan effect size sebesar (0,15), α (0.05), serta power (0.95). Hasil yang didapati peneliti untuk digunakan sebagai jumlah minimal sampel adalah sebanyak 89 subjek. Peneliti menggunakan sampel sebanyak 558 subjek untuk memenuhi jumlah minimal sampel yang telah didapat dan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya sampel yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peneliti.

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling*. Siapa saja yang secara kebetulan/accidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2013). Karakteristik yang dimiliki oleh anggota dalam populasi diperkirakan mampu untuk memberikan informasi yang diinginkan dalam penelitian, karena memiliki karakteristik sebagai Warga Negara Indonesia, memiliki hak pilih pada tahun 2024, berusia minimal 17 tahun/minimal pernah satu kali berpartisipasi dalam pemilu.

Analisis data

Analisis data yang diperoleh berdasarkan hasil pengisian skala yang dilakukan oleh responden menggunakan software *IBM SPSS Statistic 20 for windows* dengan menggunakan rumus uji regresi linear sederhana. Instrument penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode angket. Terdapat dua skala adaptasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Skala Sikap terhadap berita hoax dan skala kepercayaan terhadap KPU yang dirancang oleh peneliti. Kedua skala tersebut berisi aitem-aitem pertanyaan dengan empat alternatif jawaban, yaitu

: sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS) pada setiap pertanyaan dengan skoring yang menggunakan system skala *likert*. Bentuk skala *likert* adalah yang digunakan pada penelitian ini. Skala *Likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, dan pendapat seseorang atau responden tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Setiap aitem instrumen yang menggunakan skala *Likert* akan mempunyai pilihan jawaban dari sangat negatif samapai sangat positif, dan dari jawaban tersebut memiliki skor masing-masing (Sugiyono, 2013). Aitem *favourable* (F) adalah aitem yang bersifat mendukung atau memihak terhadap suatu objek sikap dan berisi hal positif terkait objek sikap. Aitem *unfavourable* (UF) adalah aitem yang bersifat tidak mendukung atau tidak memihak terhadap suatu objek sikap dan berisi hal negatif terkait objek sikap. Berdasarkan variabel yang ada terdapat dua skala yang akan digunakan, yaitu skala KPU *trust* dan sikap terhadap berita hoax.

Skala kepercayaan politik menggunakan skala yang dibuat oleh Akhrani (2019) yang mengacu pada teori kepercayaan politik dari Lewicki (1988). Peneliti menggunakan metode *tryout* terpakai, dimana aitem dinyatakan gugur apabila telah disebar kepada subjek.

Tabel 1.
Blueprint skala KPU Trust untuk tryout

Dimensi	Aitem		Total
	F	UF	
Ability	2, 7, 12, 19, 24	11, 14, 21, 25	9
Integrity	5, 8, 15, 20, 26	1, 9, 17, 23	9
Benevolence	3, 4, 10, 13, 18, 22	6, 16, 27	9
Jumlah total	16	11	27

Setelah peneliti menyebarkan skala kepada subjek, terdapat aitem yang dinyatakan gugur karena kurang dari nilai koefisien minimal 0.25. Aitem gugur tersebut berada pada nomor 1, 6, 9, 11, 14, 22. Total aitem yang digunakan dalam analisis data penelitian berjumlah 21 aitem dan keseluruhan aitem dapat mewakili setiap dimensi. Tabel 2 berikut menampilkan *blueprint* yang digunakan dalam analisis data.

Tabel 2.
Blueprint skala KPU Trust untuk tryout

Dimensi	Aitem		Total
	F	UF	
Ability	2, 7, 12, 19, 24	21, 25	7
Integrity	5, 8, 15, 20, 26	17, 23	7
Benevolence	3, 4, 10, 13, 18	6, 27	7
Jumlah total	16	11	21

Skala *hoax* menggunakan skala yang dibuat oleh Akhrani (2019) yang mengacu pada teori *hoax* oleh Paul C & Matthews M (2016). Skala ini masih dalam proses pembentukan oleh tim penelitian. Peneliti menggunakan metode *try out*, dimana aitem dinyatakan gugur apabila telah disebar kepada subjek.

Tabel 3.
Blueprint skala *hoax* untuk tryout

Dimensi	Pesebaran Aitem	Total
Rational	1, 2, 3, 4, 5	5
Avoidant	6, 7, 8, 9	4
Dependent	10, 11, 12	3
Jumlah Total	12	12

Setelah peneliti menyebarkan skala kepada subjek, terdapat aitem yang dinyatakan gugur karena kurang dari nilai koefisien minimal 0.30. aitem gugur tersebut terdapat pada aitem 6 dan 7. Total aitem yang digunakan dalam analisis data penelitian berjumlah 10 aitem dan keseluruhan aitem dapat mewakili setiap dimensi. Tabel 4 menampilkan *blueprint* yang digunakan dalam analisis data.

Tabel 4.
Blueprint skala *hoax* setelah tryout

Dimensi	Pesebaran Aitem	Total
Rational	1, 2, 3, 4, 5	5
Avoidant	8, 9	2
Dependent	10, 11, 12	3
Jumlah Total	12	10

Uji Instrumen Penelitian

a. Daya Diskriminasi Aitem

Menurut Azwar (2012) daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem dapat membedakan antara individu maupun kelompok yang memiliki atau tidak memiliki atribut pengukuran. Daya diskriminasi aitem digunakan untuk menghitung koefisien korelasi antar distribusi skor aitem dengan distribusi skor skala.

b. Uji Validitas

Uji validitas merupakan sebuah tahapan yang dilakukan guna menguji dapat atau tidaknya suatu skala mengukur dan menghasilkan data yang tepat dan akurat sesuai dengan tujuan yang ingin diukur (Azwar, 2016). Suatu alat ukur dinyatakan memiliki validitas tinggi apabila menghasilkan data akurat dalam memberikan gambaran mengenai variabel yang diukur.

Tabel 5.
Hasil Validitas Tampang

Validitas Tampang	Jawaban	Jumlah	%
Tampilan keseluruhan skala	Jelas	323	59%
	Cukup Jelas	222	40,5%
	Kurang Jelas	3	0,5%
Ukuran huruf yang digunakan	Jelas	454	82,9%
	Cukup Jelas	94	17,1%
	Kurang Jelas	0	0%
Jenis huruf yang digunakan	Jelas	470	85,8%
	Cukup Jelas	78	14,2%
	Kurang Jelas	0	0%
Kalimat yang disampaikan	Jelas	302	55,1%
	Cukup Jelas	232	42,3%
	Kurang Jelas	14	2,6%

Berdasarkan hasil validitas tampang pada tabel 5 ditemukan bahwa hasil dari validitas dalam skala dengan empat aspek yang diambil dari total 548 responden menyatakan bahwa skala KPU *Trust* dan skala sikap terhadap berita hoax sudah valid. Tampilan, ukuran huruf, jenis huruf dan kalimat yang disampaikan dinilai sudah baik dan jelas. Maka skala dapat dinyatakan lolos uji validitas.

c. Uji Reliabilitas

Menurut Azwar (2016) reliabilitas adalah ukuran seberapa tinggi nilai instrumen dapat digunakan. Menurut Azwar (2016) penelitian dikatakan reliabel jika konsisten

memberikan jawaban yang sama. Penulis menggunakan pendekatan konsistensi internal dengan satu bentuk tes dalam mengukur reliabilitas. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat konsistensi antar aitem. Menurut Azwar (2016) jika koefisien *Cronbach Alpha* $< 0,6$ maka variabel tersebut tidak reliabel. Pendekatan konsistensi ini menggunakan perhitungan *Cronbach Alpha* $> 0,6$ maka variabel dapat dikatakan reliabel. Peneliti melakukan uji reliabilitas alat ukur yang digunakan dengan bantuan SPSS 21 for windows, dengan menggunakan teknik *Cronbach Alpha*. Reliabilitas alat ukur akan dianggap layak jika hasilnya semakin mendekati angka 1, dan reliabilitas akan dianggap rendah apabila semakin mendekati angka 0.

Metode Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis regresi linear sederhana dikarenakan penelitian ingin melihat peran propaganda FoF dalam bentuk sikap terhadap hoax terhadap kepercayaan pada KPU. Sebelum dilakukan analisis, uji asumsi dilakukan peneliti.

a. Uji Asumsi

Uji asumsi dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji linieritas. Menurut Azwar (2012) uji normalitas digunakan untuk mengetahui variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah kedua variabel memiliki hubungan signifikan atau tidak. Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan *software IBM SPSS Statistic 20 for windows* dengan menggunakan *Test for linearity* $< 0,05$ atau variabel memiliki hubungan linear apabila signifikan si kurang dari 0,05

b. Uji hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan penulis diterima atau ditolak. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan *software IBM SPSS Statistic 20 for windows* dengan menggunakan rumus uji regresi linear sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Demografis Responden

Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online, yaitu membagikannya melalui sosial media *line*, *whatsapp*, *instagram* kepada subjek dengan kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian yaitu seorang Warga Negara Indonesia, memiliki hak pilih pada Pemilu tahun 2024 dan berusia minimal 17 tahun atau minimal pernah satu kali berpartisipasi dalam Pemilu. Jumlah minimal responden adalah 100 subjek yang kemudian peneliti mendapatkan responden sebanyak 558. Hasil akhir yang didapatkan sebanyak 548 data yang dapat dipakai. 10 subjek dinyatakan gugur karena tidak sesuai dengan kriteria yaitu belum pernah memilih minimal satu kali dalam Pemilihan Umum. Deskripsi subjek penelitian ini didapatkan dari data usia pemilih, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan terakhir, media sosial yang dimiliki, dan media mengikuti berita politik.

a. Deskripsi subjek berdasarkan usia

Tabel 7.
Usia Subjek

Kategori	Jumlah	Presentase
17 tahun	8	1,5%
18-21 tahun	211	38,5%
22-40 tahun	284	51,8%
> 41 tahun	45	8,2%
Total	548	100%

Kategori rentang usia ditentukan teori perkembangan yang dikemukakan oleh Hurlock (1996) yang membagi menjadi beberapa tahap yaitu remaja awal pada umur 11 sampai dengan 17 tahun, dewasa awal pada umur 18 sampai dengan 21 tahun, dewasa pada umur 22 sampai dengan 40 tahun, dan dewasa akhir pada umur diatas 40 tahun. Didapati hasil bahwa responden penelitian ini didominasi oleh subjek dengan kategorisasi usia 22 tahun sampai dengan 40 tahun sebanyak 51.8% atau setara dengan 284 subjek, disusul dengan kategorisasi usia 18 tahun sampai 21 tahun sebanyak 38,5% atau setara dengan 211 subjek.

b. Deskripsi subjek berdasarkan jenis kelamin

Tabel 8.
Jenis Kelamin Subjek

Kategori	Jumlah	Presentase
Laki-Laki	240	43,7%
Perempuan	308	56,3%
Total	548	100%

Tabel 8 menjelaskan responden penelitian yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 308 subjek dengan persentase 56,3% sedangkan jumlah responden laki-laki yaitu 240 subjek dengan persentase 43,7%. Berdasarkan pemaparan hasil tersebut dapat diketahui bahwa responden penelitian yang berjenis kelamin perempuan lebih mendominasi dibandingkan laki-laki.

c. Deskripsi subjek berdasarkan pekerjaan

Tabel 9.
Pekerjaan Subjek

Kategori	Jumlah	Presentase
Mahasiswa	271	50.4%
Wiraswasta	33	6%
Pegawai Swasta	120	21.9%
PNS	20	3.6%
IRT	20	3.6%
Guru	37	6.8%
Freelance	12	2.1%
Dokter	3	0.5%
Dosen	7	1.3%
Pegawai BUMN	3	0.5%
Pelajar	2	0.4%
Pengacara	1	0.1%
Belum bekerja	7	1.3%
Analisis	1	0.1%
Bidan	1	0.1%
Dietisien	1	0.1%
Grafolog	1	0.1%
Penulis	1	0.1%
Traveler	1	0.1%
Lain-lain	6	1%
Total	548	100%

Berdasarkan pemaparan data yang ada pada tabel 9, didapati hasil bahwa responden penelitian ini memiliki keberagaman pekerjaan. Adapun responden terbanyak adalah mahasiswa yakni 268 subjek dengan presentase sebesar 75%.

d. Deskripsi subjek berdasarkan pendidikan terakhir

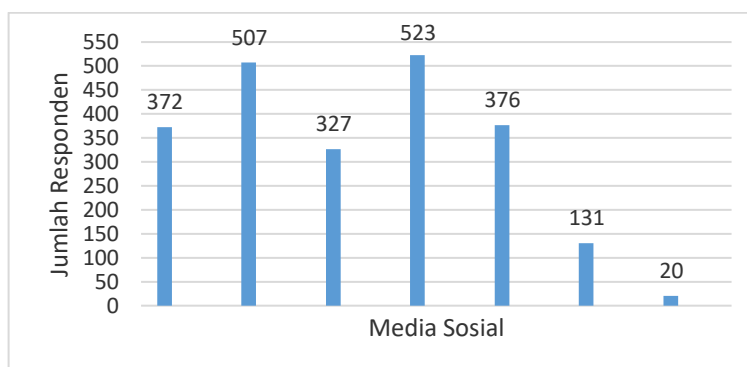
Mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir SMA yakni berjumlah 275 subjek dengan persentase 50,2%.

Tabel 10.
Pendidikan Terakhir

Kategori	Jumlah	Presentase
SMP	1	0,2%
SMA	275	50,2%
SMK	5	0,9%
D1	3	0,5%
D2	1	0,2%
D3	18	3,3%
D4	3	0,5%
S1	213	38,9%
S2	23	4,2%
S3	4	0,7%
Lain-lain	2	0,4%
Total	548	100%

e. Deskripsi subjek berdasarkan media sosial yang dimiliki

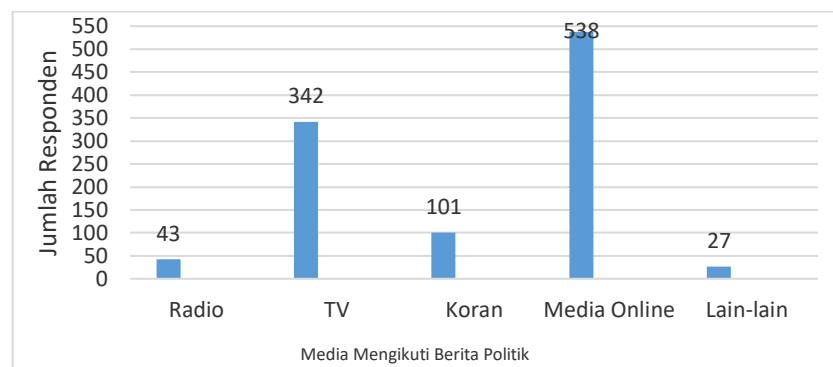
Gambar 1 menjelaskan bahwa subjek pada penelitian ini menggunakan berbagai macam media sosial. Setiap subjek dapat memilih lebih dari satu media yang dimiliki untuk mengikuti berita politik. Menurut data yang didapatkan dari 548 subjek, sebanyak 523 subjek memiliki media sosial *whatsapp*. Sebanyak 507 subjek memiliki media sosial *instagram* atau sebesar 92,5%.



Gambar 1. Media sosial yang dimiliki

f. Deskripsi subjek berdasarkan media mengikuti berita politik

Gambar 2 menjelaskan bahwa subjek penelitian ini mengakses berita politik melalui berbagai macam media. Setiap responden dapat memilih lebih dari satu media untuk mengikuti berita politik. Sehingga pada kuisioner yang disebar, responden dapat memilih lebih dari satu media mengikuti berita politik. Menurut data yang diperoleh dari 548 subjek, 538 subjek memilih mengakses berita politik melalui media online seperti tempoonline, viva.co.



Gambar 2. Media Mengikuti Berita Politik

g. Deskripsi subjek berdasarkan pernah memilih dalam Pemilu minimal satu kali.

Tabel 11 menunjukkan bahwa sebanyak 548 subjek pada penelitian ini sudah pernah mengikuti dan memilih dalam Pemilihan Umum minimal sebanyak satu kali.

**Tabel 11.
Memilih dalam Pemilu Minimal Satu Kali**

Data Demografis	Kategori	jumlah	presentase
Memilih dalam Pemilu minima 1x	Ya	548	100%
	tidak	-	-
	Total	548	100%

Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini menguji dua variabel, yaitu variabel sikap pada berita *hoax* dan variabel kepercayaan pada KPU yang kedua deskripsinya diperoleh melalui penghitungan secara manual dan bantuan perangkat lunak. Data hipotetik diperoleh dari penghitungan manual dan data empirik diperoleh melalui bantuan dari perangkat lunak *SPSS versi 20.0 for windows*. Berikut adalah hasil penghitungan data yang diperoleh melalui deskripsi hipotetik dan empirik yang didapat melalui

perbandingannya. Berikut adalah hasil penghitungan data yang diperoleh melalui deskripsi hipotetik dan empirik yang didapat melalui perbandingannya.

Tabel 12
Perbandingan Data Hipotetik dan Empirik

Variabel	Statistik	Data Hipotetik	Data Empirik
Sikap pada Berita Hoax	Skor Minimum	10	20
	Skor Maksimum	40	40
	Mean	25	33.01
	Standar Deviasi	5	4.36
KPU Trust	Skor Minimum	13	22
	Skor Maksimum	52	52
	Mean	32.5	43.07
	Standar Deviasi	6.5	5.08

Hasil dari masing-masing variabel yang telah diperoleh ini kemudian dikategorisasikan berdasarkan norma-norma yang telah terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menentukan batas minimal dan maksimal pada data masing-masing variabel untuk mengetahui kategorisasi daerah keputusan yang telah ditentukan.

a. Variabel Sikap pada Berita Hoax

Tabel 13.
Kategori Variabel Sikap pada Berita Hoax

Kategori	Daerah keputusan	Jumlah	Presentase
Rendah	$X < 20$	-	-
Sedang	$20 \leq X < 30$	115	20.98%
Tinggi	$30 \leq X$	433	79.02%
Total		548	100%

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui bahwa dari 548 responden penelitian, terdapat 20.98% responden memiliki kecenderungan yang sedang sikap menjauhi berita hoax, dan sebanyak 79.02% responden memiliki sikap yang tinggi pada berita hoax.

b. Variabel KPU Trust

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa dari 548 responden penelitian, terdapat 54.7% atau setara dengan 300 responden memiliki kecenderungan yang tinggi pada KPU Trust.

Tabel 14.
Kategori Variabel KPU Trust

Kategori	Daerah Keputusan	Jumlah	Presentase
Rendah	$X < 42$	58	10.6 %
Sedang	$42 \leq X < 63$	300	54.7 %
Tinggi	$63 \leq X$	190	34.7 %
Total		548	100%

Hasil Analisis Data

1. Uji Asumsi

Uji ini dilakukan untuk melihat pemenuhan dalam persyaratan pada model regresi linear sederhana yang dilakukan peneliti sebelum melakukan tahap selanjutnya yaitu perhitungan uji hipotesis penelitian. Terdapat dua uji asumsi dalam penelitian ini yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi dari data terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada data dari penelitian ini, setiap variabelnya dapat berhubungan secara linear mengikuti garis lurus atau tidak. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat persamaan yang berlaku ketika salah satu nilai dari variabel naik atau turun akan mempengaruhi variabel yang lain. Gambar berikut ini merupakan hasil uji asumsi sebelum dilakukannya uji hipotesis.

a. Uji Normalitas

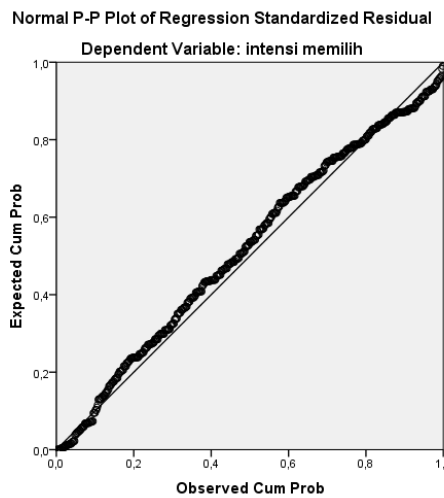
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi dari data terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov pada SPSS Versi 2.0.

Tabel 15
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S)

Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
Sikap pada Berita Hoax KPU Trust	0.000	Tidak Normal

Berdasarkan olah data pada uji normalitas didapatkan nilai signifikansi dari variabel sikap pada berita *hoax* dan KPT *trust* sebesar 0.000 hal tersebut menunjukkan bahwa data yang didapatkan tidak terdistribusi secara normal ketika merujuk pada hasil menggunakan perhitungan normalitas *kolmogorov-smirnov*, hal ini dikarenakan nilai

signifikansi yang didapatkan kurang dari 0.05. sebaran data hasil uji normalitas dapat dilihat pada *p-plot* di bawah ini. Terlihat bahwa titik-titik persebaran data mengikuti garis normal.



Gambar 3. *P-plot* Sebaran Normalitas Data Penelitian

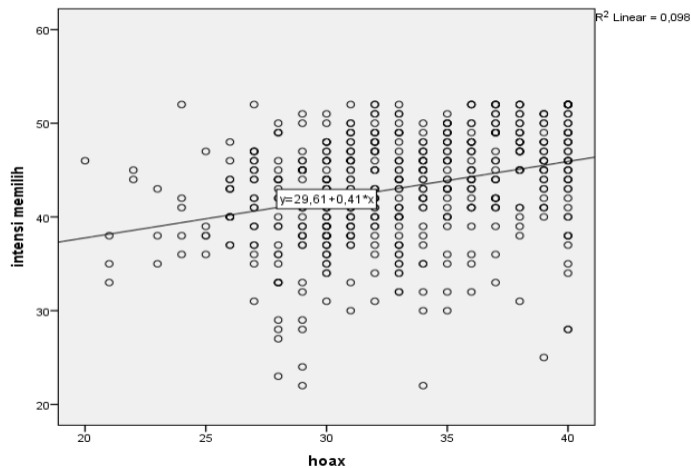
b. Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada data dari penelitian ini, setiap variabelnya dapat berhubungan secara linear mengikuti garis lurus atau tidak (Sugiyono, 2007). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat persamaan yang berlaku ketika salah satu nilai dari variabel naik atau turun akan mempengaruhi variabel yang lain.

Tabel 16.
Hasil Uji Linearitas

Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
Sikap pada berita <i>hoax</i> * KPU <i>Trust</i>	0.097	Linear

Berdasarkan olah data pada uji linearitas dapat diketahui hasil nilai olah pada signifikansi variabel sikap pada berita *hoax* terhadap intensi memilih 2024 sebesar 0.097, artinya nilai tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dikatakan linear karena *Deviation from linearity* telah berada pada nilai lebih dari 0.05. pembuktian linearitas juga dapat dilihat dari penggunaan plot pada *scatterplot* di SPSS. Apabila hasil plot mengikuti garis fit line dan menyebar, maka dapat dikatakan data yang didapatkan linear. Berikut hasil uji linearitas menggunakan *plot*.



Gambar 5. Scatter Plot Linearitas

2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk mengetahui bagaimana peran variabel X yaitu sikap terhadap hoax terhadap variabel Y yaitu kepercayaan kepada KPU. Selain itu, analisis regresi yang dilakukan juga dapat mengetahui sejauh mana kontribusi variabel X yaitu sikap terhadap hoax terhadap variabel Y yaitu kepercayaan kepada KPU. Berikut ini adalah tabel hasil analisis regresi yang digunakan untuk uji hipotesis.

Tabel 17.
Hasil Uji Hipotesis

Independent Variable	Kepercayaan Kepada KPU		
	β	t-value	ρ
Sikap Terhadap Hoax	0.209**	4.982	0.000
R ₂	0.043		

Berdasarkan tabel 17 menunjukkan bahwa variabel X yaitu sikap terhadap hoax memiliki peran signifikan positif terhadap variabel Y yaitu kepercayaan kepada KPU ($\beta = 0.209$, $\rho = 0.000$). Tabel di atas juga menunjukkan bahwa variabel X yaitu sikap terhadap hoax memberikan kontribusi terhadap variabel Y yaitu kepercayaan kepada KPU sebesar 0.04% ($R_2 = 0.043$).

Pembahasan

Kekacauan penyelenggaraan pemilu 2019 menjadi sejarah buruk penyelenggaraan pemilu langsung dan serentak. Berbagai kekacauan yang timbul dalam pemilu 2019 membawa banyak dampak perilaku pada masyarakat. Kekacauan

tersebut merata di hampir seluruh daerah pemilihan, seperti penyelenggaraan pemilihan umum 2019 di sejumlah daerah mengalami kendala. Mulai dari masalah distribusi logistik, kekurangan surat suara, kerusakan kotak suara, kerusakan surat suara, hingga surat suara tercoblos lebih dulu. Deretan kasus ini menunjukkan KPU gagal menjamin pemilu berjalan langsung (Kresna, 2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat peran antara sikap pada berita *hoax* dengan kepercayaan pemilih terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Penelitian ini melibatkan sebanyak 548 responden yang merupakan Warga Negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau minimal pernah satu kali berpartisipasi dalam Pemilu, dan memiliki hak pilih pada Pemilu tahun 2024. Peneliti melakukan analisis, dapat diketahui bahwa terdapat peran antara sikap pada berita *hoax* dengan kepercayaan terhadap KPU, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif pada penelitian ini dapat diterima.

Hasil penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan penelitian oleh Winchester, Binney, & Hall (2014) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menentukan pilihan. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan ketika seseorang mendapatkan berita lalu mencari kebenarannya terlebih dahulu dapat mempengaruhi intensi memilih seseorang. Pemilih yang aktif dalam mencari informasi dari berbagai sumber informasi tidak akan diombang-ambingkan berita yang tersebar secara masif. Pemilih yang aktif mendapatkan informasi dapat membandingkan berbagai sumber dan secara emosi dapat lebih stabil dalam merespon berita yang diterima. Hal ini berbeda dengan pemilih yang pasif dalam mendapatkan informasi. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian ini karena para pemilih yang mengandalkan informasi yang diperoleh secara pasif melalui media dapat mempengaruhi individu dalam menentukan pilihan. Pasif dalam membandingkan sumber berita dapat menyebabkan pemilih bereaksi secara emosional saat menerima berita, tanpa mencari tahu kebenaran isi berita.

Penelitian yang dilakukan Astriksa (2016) dan Winchester dkk (2014) sepakat mengatakan bahwa lingkungan eksternal dapat mempengaruhi individu dalam menentukan pilihan. Winchester dkk (2014) mengatakan bahwa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi yaitu media, keluarga, dan teman. Penelitian ini mendapatkan

hasil bahwa terdapat hubungan antara sikap pada berita *hoax* dan intensi memilih. Fenomena pemilihan umum tahun 2019 yang sudah berjalan menimbulkan berbagai kekacauan yang masih berkepanjangan sampai dengan saat ini. Kekacauan yang dipersepsikan sebagai efek perilaku tidak netral KPU sendiri menyisakan kasus suap terkait pemilihan umum seperti dengan ditetapkannya salah satu komisioner KPU Wahyu Setiawan. Perilaku suap dalam lembaga sebesar KPU sendiri diyakini bukan sebagai perilaku individu tetapi sebagai perilaku suap bersama (kolektif) yang tidak hanya melibatkan komisioner KPU secara personal tetapi juga diduga terkait anggota KPU lainnya dan lembaga-lembaga politik lainnya yang berkepentingan seperti partai politik (Prabowo, 2020).

Peneliti memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Keterbatasan yang didapat adalah masih sedikitnya penelitian-penelitian terdahulu yang langsung menghubungkan antara variabel sikap pada berita *hoax* dan variabel intensi memilih dalam Pemilu. Sehingga dalam penelitian ini terbatasnya referensi yang digunakan.

KESIMPULAN

Pemilu yang diawali dengan berbagai kekacauan penyelenggaraan pemilu ditambah lagi dengan simpang siur pemberitaan yang diterima masyarakat tanpa upaya klarifikasi yang cukup baik membuat penurunan rasa kepercayaan terhadap KPU. Kekacauan dimulai dari berbagai kekurangan, kesalahan pendisrupsi surat suara, data pemilih yang sampai detik akhir waktu pemilihan yang belum jelas jumlah dan pemilihannya, pemilih ganda, surat sudah tercoblos sebelum pemilu dilaksanakan dan berlanjut terus sampai dengan pelaksanaan pemilu seperti kesalahan input suara, penggelembungan suara, pemilih fiktif, sampai dengan terjadi OTT KPK terhadap perilaku suap komisioner pemilu. Berbagai kekacauan pemilu menghasilkan kegaduhan dalam masyarakat. Konflik horizontal maupun vertikal yang seolah tak pernah reda. Hasil penelitian terhadap 558 responden penelitian ini menunjukkan terdapat peran sikap pada *hoax* terhadap kepercayaan politik. Meskipun peran terbilang kecil, namun menunjukkan hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan upaya dari berbagai pihak untuk melakukan penyaringan informasi politik yang diterima agar kepercayaan pada lembaga penyelenggaraan pemilu meningkat..

Melihat kecilnya peran variabel sikap hoax terhadap KPU trust, dibutuhkan penelitian lebih mendalam terhadap variabel lain yang memungkinkan memiliki peran yang besar pada KPU trust. Skala KPU trust merupakan hasil konstruksi alat test yang baru dibutuhkan pengujian lebih dalam dan penggunaan di berbagai penelitian lainnya. Selain itu, menjadi tantangan tersendiri untuk penelitian terkait sikap terhadap hoax mengingat belum adanya teori sikap terhadap hoax menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi penelitian lain untuk mempergunakan dalam penelitian-penelitian lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat peran sikap hoax pada kepercayaan KPU maka sebagai lembaga penyelenggara pemilu sebaiknya memperbaiki kinerja sebagai pembuktian pada pemilih untuk meningkatkan legitimasi dan kepercayaan pemilih pada KPU. Kegaduhan politik selama masa kampanye sampai penetapan pemenang pemilu membuat situasi politik yang kacau dan tidak kondusif, hal ini dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan politik warga negara terhadap semua lembaga termasuk KPU. Efek terpanjang adalah pada tingkat partisipasi politik pada tahun pemilihan umum 2024. Selain itu KPU dapat melakukan counter hoax dengan menunjukkan bukti terkait berita hoax KPU. Bagi pemilih, sebelum menerima isi pemberitaan politik terutamanya terkait kinerja KPU sebaiknya pemilih melakukan beberapa tahapan seleksi berita agar terhindar dari paparan berita hoax.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (2012). *Metode penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2016). *Reliabilitas dan validitas*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bauer, F. (2012). Politics is for people. Issue 01. *The GIZ Magazine Akzante*.
- Crête, J., Pelletier, R., & Couture, J. (2007). Political trust, values, performance and media : a canadian profile. Department of Political Science. Laval University. Quebec, Canada. *Paper prepared for delivery at the 65th MPSA National Conference*
- Dayakisni, T., & Hudaniah (2006). *Psikologi sosial*. UMM PRESS
- ESD Inds. Excerpt from Values-based Indicators for Sustainable Development: Draft. handbook for Civil Society Organisations On Values: Understanding Trust

- Hasbi, W., Tantio, F., Azhari, A., Ayu, K., Fatimah, Ivan M.A., Mirra N.M. (2013). Peran kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi terhadap partisipasi politik mahasiswa. *Jurnal Psikologi*. Vol.9. (2), pp. 94-99.
DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/jp.v9i2.171>
- Judith, C. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation. *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1, April 2018: 31-44.
DOI: <http://dx.doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>
- Johnson, D. W., & Johnson, F. P. (2000). *Joining together: Group theory and group skill*. MA: A Pearson Education Company. 160 Gould Street. Nedham Heights.
- Kaase, M. (1999). Interpersonal trust, political trust, and non institutionalized political participation in Western Europe. *West European Politics*. Vol. 22. (3). Pp.1-21.
<https://doi.org/10.1080/01402389908425313>
- Kresna, M. (2019). Deretan Kekacauan Pemilu 2019, Bukti Kegagalan KPU Baca selengkapnya di artikel "Deretan Kekacauan Pemilu 2019, Bukti Kegagalan KPU". Retrieved from <https://tirto.id/dmwX>
- Kurniawan, A. (2019). Delegitimasi KPU Itu Maksudnya Apa? Yang Mendelegitimasi KPU Siapa? Retrieved from <https://rmol.id/read/2019/01/14/374900/delegitimasi-kpu-itu-maksudnya-apa-yang-mendelegitimasi-kpu-siapa>
- Lewicki, R. J. (1995). *Trust in relationship: A model of development and decline in conflict, cooperation and justice*. Essay. San Francisco
- Mashabi, S. (2019). Banyak Kekacauan, PKS Nilai Pemilu 2019 Perlu di Evaluasi. Retrieved from <https://www.merdeka.com/politik/banyak-kekacauan-pks-nilai-pemilu-2019-perlu-dievaluasi.html>
- Mastel. (2017). Hasil Survey MASTEL Tentang Wabah HOAX Nasional. Retrieved from <http://mastel.id/infografis-hasil-survey-masteltentang-wabah-hoax-nasional/> tanggal 2 Desember 2017.
- Miztal. (2001). Trust and cooperation: The democratic public sphere. *Journal of Sociology*. Vol. 37. (4), pp. 371-386. <https://doi.org/10.1177/144078301128756409>
- Prabowo, D. (2020). Wahyu Setiawan, Komisioner KPU Kelima yang Jadi Tersangka KPK

Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2020/01/10/06470011/wahyu-setiawan-komisioner-kpu-kelima-yang-jadi-tersangka-kpk) dengan judul "Wahyu Setiawan, Komisioner KPU Kelima yang Jadi Tersangka KPK". Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/10/06470011/wahyu-setiawan-komisioner-kpu-kelima-yang-jadi-tersangka-kpk>.

Pratama, A. B. (2016). Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229_170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebarhoax-di-indonesia/ tanggal 2 Desember 2017.

Rahn, M., & Rudolf, T. (2005). A tale of political trust in american cities. *Journal of Sociology*. (69). (4), Pp. 530-560. <https://www.jstor.org/stable/3521520>

Schoon, I., & Cheng, H. (2011). Determinants of political trust: A lifetime learning model. *Developmental Psychology*, 47(3), 619-631

Sinambela, L. P. (2014). *Metodologi penelitian kuantitatif: Untuk bidang ilmu administrasi, kebijakan publik, ekonomi, sosiologi, komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Simangunsong, B. (2004). *Negara. demokrasi dan berpolitik yang profesional*. Jakarta: Gramedia.

Tao, R., Yang, D.L., Li, M., & Lu, X. (2014). How does political trust affect social trust? An analysis of survey data from rural China using an instrumental variables approach. *International Political Science Review*. Vol. 35(2), Pp.237-253. SAGE. <https://doi.org/10.1177/0192512113492599>

Yudong, W. (2008). Regime type and political trust: An quantitative analysis on 26 Asian-Pacific Societies. *Dissestation*. Chinese Academy of Social Sciences. Beijing